

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik dipusat maupun di daerah. Kecurangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok secara sengaja yang berdampak dalam laporan keuangan dan dapat mengakibatkan kerugian bagi entitas atau pihak lain.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. (Mardiasmo, dalam Herawati, 2014). Akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan dipemerintah yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaan.

*Fraud* sebagai representasi tentang fakta material yang palsu dan sengaja atau ceroboh sehingga diyakini dan bertindaklanjuti oleh korban dan kerusakan korban. (Albrecht, 2003). Pemerintah yang mengemban kepercayaan dari masyarakat mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, salah satu adalah memastikan bahwa keuangan negara dikelola dengan baik dan *accountable*.

Dalam meminimalis fraud pihak auditor harus mempertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan. Budaya etis dan pengendalian dianggap mampu mempengaruhi kecenderungan kecurangan. Karena budaya etis dan pengendalian internal melakukan pengawasan guna mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.

Hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan variabel Budaya etis terhadap kecenderungan kecurangan menunjukkan ada persamaan dengan yang dilakukan oleh Trisna,dkk (2014) menyatakan bahwa budaya etis berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Pramudita (2013), efektifitas pengendalian internal dan Budaya etis berpengaruh negatif terhadap fraud disektor pemerintah Kota Salatiga. Namun ardiyani, dkk (2016) menyatakan bahwa budaya etis menejemen berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan disektor pemerintah.

Ketaatan aturan Akuntansi merupakan tindakan untuk mengurangi kecurangan. Semakin tinggi tingkat ketaatan terhadap penegakan peraturan maka semakin kecil pegawai tersebut untuk berbuat atau melakukan tindakan yang merugikan instansi, dan sebaliknya jika tingkat ketaatan terhadap peraturan rendah maka pegawai tersebut cenderung mengesampingkan peraturan yang berlaku dan cenderung melakukan kecurangan.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Thoibatun (2009) memberikan hasil kesimpulan bahwa Ketaatan peraturan berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan

oleh Devia dan Sukardi (2015) ketaatan peraturan berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan pada dinas pemerintah se kabupaten Grobogan.

Menurut Cieslewics (2012) mengemukakan bahwa untuk memahami kecurangan yang terjadi dimasyarakat cina harus mempertimbangkan keadilan sosial seperti penegakan peraturan. Hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penegak peraturan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor pemerintah menunjukkan adanya perbedaan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Adinda dan Sukardi (2015) yang menyatakan bahwa penegakan peraturan tidak berpengaruh dengan kecenderungan peraturan. Namun Devia (2015) menghasilkan kesimpulan bahwa penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Sedangkan hasil penelitian ardiyani, dkk. (2016) memberikan kesimpulan bahwa penegak hukum berpengaruh signifikan terhadap kecendrungan kecurangan disektor pemerintahan.

Komitmen organisasi merupakan persepsi pegawai tentang rasa identifikasi (kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi), keterlibatan (kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi) dan loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang bersangkutan) yang dinyatakan oleh seorang pegawai. Streers (1985:50) dalam Adinda dan Sukardi(2015).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adinda dan Sukardi(2015) menunjukkan komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Berbeda dengan hasil penelitian Devia dan Sukardi (2015) menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan, Sedangkan penelitian Ardiyani(2016) yang

menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Alasan penulis untuk melakukan penelitian ini terdapat kecurangan dalam pemerintah salah satunya dipemerintah desa. Banyaknya kasus kecurangan akuntansi yang terjadi menunjukkan bahwa kecurangan akuntansi masih tinggi dipemerintah desa. Padahal pemerintah desa berdiri untuk mengembangkan misi memberikan kontribusi kepada negara, pelayanan masyarakat serta mensejahterkan masyarakat khususnya di desa. Hal ini terungkap dalam acara pembukaan Klinik Konsultasi Pengelolaan Keuangan di Desa bertema Kades lawas (Kawal Desa melalui Pengawasan) di gedung korpri kabupaten Ponorogo. Dikatakan, satgas Desa Kemendes menemukan ada 900 dari 74 ribu desa di Indonesia yang melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan sejak program dana desa diluncurkan di 2005 lalu. ICW menemukan 110 kasus korupsi dalam kurun waktu 2016 sampai 2017. Dari jumlah ini, 97,27 persen pelaku korupsinya adalah kepala desa. Dari kasus ini, ICW melihat ada lima modus penyimpangan pengelolaan keuangan. Modus itu adalah mark up, anggaran ganda atau pemakaian beberapa sumber anggaran untuk satu kegiatan, pemotongan honor perangkat desa, bekerja sama dengan pihak lain untuk membuat proyek fiktif dan pemotongan pajak namun tidak disetorkan. Secara nasional, dana desa yang dikucurkan pada 2015 adalah Rp20,76 triliun atau tiap desa menerima Rp280 juta pertahun. Di 2016, dana desa kembali meningkat menjadi sekitar Rp 45 triliun atau tiap desa menerima kucuran sebesar Rp. 600 juta. Sedangkan di 2017

dan 2018 masing-masing adalah Rp 60 triliun atau tiap desa menerima dana desa sebesar Rp800 juta per tahun. (beritajatim.com,28/8/2018).

Berdasarkan penelitian terdahulu maka topik penelitian ini untuk menarik diteliti kembali dengan mengacu Tresna Herawati (2014). Namun demikian terdapat perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan objek Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Sayung Demak Periode 2018 sedangkan penelitian terdahulu menggunakan objek Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jembrana periode 2014.

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil dan fenomena tersebut, maka penelitian tertarik melakukan penelitian dengan judul **“HUBUNGAN BUDAYA ETIS, KETAATAN ATURAN AKUNTANSI, PENEGAK PERATURAN, KOMITMEN ORGNISASI TERHADAP FREKUENSI KECENDERUNGAN KECURANGAN PADA SEKTOR PEMERINTAH DESA”**.

## **1.2. Rumusan masalah**

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) bertujuan mengurangi kecurangan pada pemerintah desa. kecurangan dalam penelitian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Budaya etis, ketaatan peraturan, penegak peraturan dan komitmen organisasi.

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya terdapat perbedaan mengenai budaya etis, ketaatan peraturan, penegak peraturan dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan di sektor pemerintah desa, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Hubungan Budaya Etis terhadap Kecenderungan Kecurangan?
2. Bagaimana Hubungan ketaatan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan?
3. Bagaimana Hubungan penegak peraturan terhadap kecenderungan kecurangan?
4. Bagaimana Hubungan komitmen organisasi terhadap kecenderungan organisasi?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian:

1. Membuktikan hubungan budaya etis memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan.
2. Membuktikan hubungan ketaatan peraturan memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan.
3. Membuktikan hubungan penegak peraturan memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan.
4. Membuktikan hubungan komitmen organisasi memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana dalam pengembangan pengetahuan khususnya akuntansi pemerintah.

## 2. Aspek praktis

- Bagi pemerintah, dapat menjadi wacana pemikiran mengenai informasi khususnya akuntansi pemerintah daerah.
- Bagi akademisi, dapat dijadikan sumber referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya mengenai kecenderungan kecurangan di pemerintah daerah.